

Analisis Dampak Kenaikan Tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 11% Terhadap PT Sari Kencana

Atika Fitriani¹, Cindy Fredicia Putri², Dwi Fionasari³, Putri Dasti S
Harahap⁴, Sarifah Aini Hasibuan⁵

^{1,2,3,4,5} Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas
Muhammadiyah Riau, Indonesia

email: 210301098@student.umri.ac.id

Abstract

This research examines the impact of increasing the Value Added Tax (VAT) rate to 11% on PT operations. Sari Kencana, a transportation services company. The aim of the research is to analyze the influence of this policy on ticket sales, market demand, and the company's adaptation strategy. The research uses qualitative methods with descriptive analysis, collecting primary data through interviews and observations, as well as secondary data from related documents. The research results show that the increase in VAT rates affects operational costs and people's purchasing power, which results in a decrease in the number of customers. To overcome these challenges, PT Sari Kencana adjusts ticket prices, optimizes operational costs, improves service quality, and utilizes technology, such as developing ticket ordering applications. This strategy helps companies maintain competitiveness and customer loyalty, despite pressures due to fiscal policy.

Keywords: Value Added Tax, PT Sari Kencana, 11% VAT, Ticket Prices

1. PENDAHULUAN

Pajak yang merupakan sumber daya keuangan strategis yang paling penting bagi suatu negara, dapat mendukung upaya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat. Ini menjadikannya salah satu faktor penting dalam upaya pembangunan nasional (Gunawan et al., 2022). Berdasarkan data dari Sekretariat Kabinet Republik Indonesia 2023 pajak berkontribusi sebanyak 64,6% dari total pendapatan negara.

Penerimaan negara dari sektor pajak berasal dari berbagai jenis pajak, seperti Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Pajak Penjualan atas Barang Mewah

(PPnBM), serta Bea Materai, Bea Cukai, Bea Impor, dan Bea Ekspor. Pajak penghasilan memberikan kontribusi terbesar dalam pembiayaan pengeluaran negara, meskipun pajak ini hanya dikenakan pada individu yang memiliki penghasilan di atas batas penghasilan tidak kena pajak dan memenuhi kriteria sebagai wajib pajak. Berbeda dengan pajak penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pelunasannya dapat dialihkan atau dikenakan kepada pihak lain (melalui mekanisme tax amnesty).

PPN adalah salah satu bentuk penerimaan pajak. Menurut Kementerian Keuangan Learning Center, PPN merupakan pajak yang dipungut atas saat membeli atau menjual barang atau jasa di daerah tertentu. PPN dikurangi secara

bertahap selama proses produksi dan distribusi. Ini menunjukkan bahwa PPN akan dipungut saat melakukan transaksi penyerahan (Rizkianti & Fatimah, 2023).

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi salah satu kontributor terbesar bagi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) secara fiskal. Berdasarkan data dari Kementerian Keuangan, kontribusi PPN terhadap total penerimaan pajak akan mencapai sekitar 40% pada tahun 2022, menunjukkan peran strategisnya dalam struktur pendapatan negara.

Dengan berlaku pada tanggal 1 April 2022, kenaikan PPN 10% sebelumnya menjadi 11% diumumkan oleh Sri Mulyani, Menteri Keuangan Indonesia, dan undang-undang perpajakan tersebut disetujui oleh Presiden Joko Widodo. Sri Mulyani menjelaskan bahwa alasan utama kenaikan PPN menjadi 11% adalah untuk meningkatkan pemasukan penerimaan negara dan memperbaiki kondisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu langkah penting dalam reformasi perpajakan untuk memastikan keberlanjutan fiskal adalah kenaikan tarif PPN menjadi 12%, yang akan berlaku pada tahun 2025 (Malendes et al., 2024).

Peningkatan tarif ini disebabkan oleh kebutuhan pemerintah untuk meningkatkan penerimaan negara yang stabil, terutama untuk meningkatkan belanja negara di bidang yang sangat penting seperti infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial. Menurut (Srimaryani, 2023), reformasi pajak ini adalah bagian dari upaya pemerintah untuk mengurangi ketergantungan pada utang internasional yang telah meningkat selama sepuluh tahun terakhir. Namun, ada kekhawatiran tentang dampak negatif kebijakan tersebut

terhadap perekonomian domestik, terutama konsumsi masyarakat, yang merupakan salah satu pendorong utama pertumbuhan PDB (Kharisma et al., 2023).

Menurut penelitian dari (Rizkianti & Fatimah, 2023) kenaikan tarif PPN yang mulai berlaku pada 1 April 2022 menyebabkan penurunan penjualan di PT XYZ Cabang Tangerang. Penurunan hasil penjualan ini terjadi pada bulan April dan Mei 2022, yang dapat dilihat dari tidak tercapainya target penjualan yang ditetapkan oleh perusahaan. Sedangkan menurut (Veni Gerhana Putri, 2022) Penerapan tarif PPN sebesar 11% yang mulai berlaku pada 1 April 2022 memberikan pengaruh yang signifikan terhadap penjualan PT X. Selain itu, perubahan tarif PPN sebesar 11% juga berdampak signifikan terhadap perilaku pembelian konsumen.

Pajak Pertambahan Nilai (PPN), yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 dan perubahannya, dikenakan pada dua jenis usaha travel, yaitu biro perjalanan umum dan agen perjalanan. PPN adalah salah satu jenis pajak yang dikenakan pada usaha travel.

PT Sari Kencana adalah salah satu pengusaha kena pajak yang memungut pajak dari hasil penjualan kepada konsumen. PT Sari Kencana membayar PPN sebesar 11% untuk barang yang mereka beli pada tanggal 1 April 2022. Kebijakan ini akan berdampak besar pada perusahaan yang menjalankan bisnis.

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis ingin melakukan penelitian tentang PT Sari Kencana. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana kenaikan tarif PPN 11% berdampak pada penjualan tiket di PT Sari Kencana, bagaimana dampak kenaikan tarif PPN 11% pada permintaan pasar dan bagaimana dampak kenaikan tarif PPN 11% pada perusahaan.

Tujuan dari penelitian ini untuk:

1. Mengidentifikasi dan mengevaluasi strategi penyesuaian harga tiket yang diterapkan PT Sari Kencana untuk menjaga keseimbangan antara biaya operasional dan daya beli konsumen.

2. Meneliti langkah-langkah optimalisasi biaya operasional yang diterapkan PT Sari Kencana dalam menjaga efisiensi di tengah kebijakan kenaikan tarif PPN

3. Menganalisis peran peningkatan kualitas layanan dalam mempertahankan loyalitas pelanggan meskipun terdapat kenaikan harga tiket

4. Mengeksplorasi dampak implementasi teknologi digital terhadap efisiensi operasional dan kepuasan pelanggan setelah kenaikan tarif PPN PT Sari Kencana

5. Mengkaji dampak kebijakan kenaikan tarif PPN terhadap perilaku pengguna jasa transportasi serta adaptasi strategi bisnis yang dilakukan PT Sari Kencana.

2. METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif karena, berdasarkan pengamatan atau observasi awal peneliti, ternyata masalah yang dihadapi lebih cocok untuk diteliti melalui metode kualitatif analisis deskriptif. Metode penelitian digunakan untuk menentukan bagaimana menyelesaikan berbagai masalah penelitian. Peneliti memilih untuk menggunakan metode penelitian kualitatif analisis deskriptif untuk mencari, mengumpulkan, mengolah, dan menganalisis informasi yang diperoleh dari penelitian.

Dalam penelitian ini, penulis akan menyajikan hasil observasi terkait penerapan PPN oleh PT Sari Kencana serta dampak yang ditimbulkan akibat kenaikan tarif PPN terhadap penjualan. Observasi yang dilakukan berdasarkan

proses wawancara dengan pihak PT Sari Kencana yaitu dengan Bapak Adlen Afrizal selaku Pimpinan yang menjadi sampel dalam penelitian ini. Selain wawancara, penulis juga membutuhkan dokumentasi data, seperti data penjualan, sebagai bagian dari penelitian ini. Subjek penelitian ini adalah PT Sari Kencana yang terletak di Jl. T. Tambusai Ujung.

Penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan informan dari bagian keuangan dan bagian penjualan di PT Sari Kencana. Sedangkan data sekunder diperoleh dari dokumentasi yang mencakup data penjualan PPN PT Sari Kencana.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Implikasi undang-undang No. 7 tahun 2021 tentang pertambahan tarif ppn 11% terhadap PT. Sari Kencana. Undang-Undang No. 7 Tahun 2021 adalah undang-undang yang disahkan oleh pemerintah Indonesia untuk melakukan harmonisasi peraturan perpajakan. Undang-undang ini bertujuan untuk memperbaiki dan menyederhanakan sistem perpajakan di Indonesia, serta meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Salah satu perubahan signifikan yang diatur dalam undang-undang ini adalah kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari 10% menjadi 11%, kenaikan ini bertujuan untuk meningkatkan pendapatan negara dan mendukung pembiayaan pembangunan (Agasie & Zubaedah, 2022).

Bentuk implikasi yang dilakukan oleh PT Sari Kencana terhadap kenaikan tarif PPN:

Penyesuaian Harga Jual Tiket

Penyesuaian harga jual tiket merupakan langkah strategis yang diambil oleh PT Sari Kencana sebagai respons terhadap kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari 10% menjadi 11%. Dengan adanya kenaikan

tarif ini, biaya yang harus ditanggung oleh perusahaan untuk setiap tiket yang dijual juga meningkat, sehingga untuk menjaga margin keuntungan, perusahaan perlu menyesuaikan harga jual tiket. Penyesuaian ini tidak hanya bertujuan untuk menutupi biaya tambahan akibat pajak, tetapi juga untuk memastikan keberlanjutan operasional perusahaan. Namun, dalam menetapkan harga baru, PT Sari Kencana harus mempertimbangkan daya beli konsumen dan kondisi pasar agar tidak kehilangan pelanggan. Oleh karena itu, perusahaan perlu melakukan analisis pasar yang mendalam untuk menentukan harga yang kompetitif, sekaligus tetap mencerminkan nilai dan kualitas layanan yang diberikan. Dengan pendekatan yang hati-hati, penyesuaian harga jual tiket diharapkan dapat membantu perusahaan tetap beroperasi secara efisien sambil memenuhi ekspektasi pelanggan.

Secara keseluruhan, penyesuaian harga jual tiket bukan hanya sekadar respons terhadap kenaikan PPN, tetapi juga merupakan bagian dari strategi yang lebih luas untuk mempertahankan daya saing, meningkatkan kepuasan pelanggan, dan memastikan keberlanjutan bisnis di tengah perubahan kebijakan perpajakan. Dengan pendekatan yang komprehensif dan berorientasi pada pelanggan, PT Sari Kencana dapat mengelola dampak dari kenaikan tarif PPN dengan lebih efektif.

Optimalisasi Biaya Operasional

Kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 11% dapat mempengaruhi biaya operasional perusahaan, termasuk PT Sari Kencana. Dalam menghadapi kenaikan ini, optimalisasi biaya operasional menjadi sangat penting untuk menjaga profitabilitas.

Perusahaan perlu menganalisis dampak kenaikan PPN terhadap harga tiket dan layanan yang ditawarkan. Dengan PPN yang lebih tinggi, biaya yang harus ditanggung oleh perusahaan akan meningkat, yang pada gilirannya dapat mempengaruhi harga yang dikenakan kepada konsumen. Oleh karena itu, PT Sari Kencana harus melakukan penyesuaian dalam strategi pengelolaan biaya, seperti mengoptimalkan penggunaan bahan bakar, memperbaiki efisiensi rute, dan meningkatkan pemeliharaan kendaraan untuk mengurangi pengeluaran yang tidak perlu (Djufri, 2022). Selain itu, perusahaan juga perlu mempertimbangkan pelatihan bagi pengemudi untuk mengurangi konsumsi bahan bakar dan meningkatkan layanan pelanggan, sehingga meskipun ada kenaikan PPN, perusahaan tetap dapat bersaing dan memberikan nilai tambah kepada pelanggan. Dengan langkah-langkah ini, PT Sari Kencana dapat menghadapi tantangan yang ditimbulkan oleh kenaikan PPN dan tetap berkomitmen untuk memberikan layanan yang berkualitas kepada masyarakat.

Peningkatan Kualitas Layanan

Peningkatan kualitas layanan merupakan langkah krusial bagi PT Sari Kencana untuk mempertahankan loyalitas pelanggan di tengah kenaikan tarif PPN. Dengan adanya kenaikan harga tiket, pelanggan akan lebih cenderung mencari nilai tambah dari layanan yang mereka terima. Oleh karena itu, perusahaan perlu berinvestasi dalam beberapa aspek untuk meningkatkan pengalaman penumpang.

Pertama, PT Sari Kencana dapat melakukan renovasi dan perawatan berkala pada armada kendaraan untuk memastikan kenyamanan penumpang, seperti penyediaan kursi yang lebih nyaman, menjaga kebersihan kendaraan, serta menyediakan fasilitas

tambahan seperti pendingin udara dan Wi-Fi gratis. Selain itu, meningkatkan frekuensi layanan, terutama pada jam-jam sibuk, akan memberikan lebih banyak pilihan waktu keberangkatan bagi penumpang, sehingga mereka tidak perlu menunggu lama dan dapat menikmati perjalanan yang lebih nyaman. Pelatihan bagi pengemudi juga sangat penting; dengan memberikan pelatihan tentang keterampilan mengemudi yang aman dan pelayanan pelanggan, pengemudi yang ramah dan profesional dapat menciptakan pengalaman positif bagi penumpang.

Selain itu, PT Sari Kencana dapat memanfaatkan teknologi dengan mengembangkan aplikasi mobile yang memungkinkan penumpang untuk memesan tiket, melacak jadwal keberangkatan, dan memberikan umpan balik tentang layanan. Terakhir, meluncurkan program loyalitas yang memberikan penghargaan kepada pelanggan setia, seperti diskon untuk perjalanan berikutnya, dapat mendorong pelanggan untuk tetap menggunakan layanan meskipun ada kenaikan harga. Dengan langkah-langkah peningkatan kualitas layanan ini, PT Sari Kencana tidak hanya dapat mengurangi dampak negatif dari kenaikan tarif PPN, tetapi juga menciptakan pengalaman yang lebih baik bagi pelanggan, yang pada gilirannya dapat meningkatkan loyalitas dan kepuasan pelanggan.

Pemanfaatan teknologi digital

Pemanfaatan teknologi digital dalam operasional angkutan umum telah menjadi salah satu faktor kunci dalam meningkatkan efisiensi dan kualitas layanan. Dengan mengimplementasikan aplikasi mobile untuk pemesanan tiket, perusahaan transportasi dapat memberikan kemudahan bagi pelanggan untuk melakukan reservasi

tanpa harus mengantri di loket. Aplikasi ini tidak hanya memungkinkan pengguna untuk membeli tiket secara langsung, tetapi juga memberikan informasi real-time mengenai jadwal keberangkatan, ketersediaan kursi, dan rute perjalanan. Selain itu, sistem manajemen transportasi yang terintegrasi dapat membantu perusahaan dalam mengoptimalkan rute, memantau kondisi kendaraan, dan mengelola armada secara lebih efektif. Dengan memanfaatkan teknologi, perusahaan dapat meningkatkan pengalaman pelanggan, mengurangi waktu tunggu, dan meminimalkan biaya operasional, sehingga menciptakan layanan yang lebih responsif dan efisien. Hal ini tidak hanya meningkatkan kepuasan pelanggan, tetapi juga berkontribusi pada keberlanjutan dan daya saing perusahaan di industri transportasi.

Dampak Kenaikan Tarif PPN 11% Bagi Pengguna Jasa Angkutan Umum dan Bagi PT. Sari Kencana

Kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 11% memiliki dampak yang signifikan bagi masyarakat dan sektor transportasi, seperti yang diungkapkan dalam penelitian oleh (Kharisma et al., 2023), dalam jurnal tersebut, dijelaskan bahwa peningkatan tarif PPN dapat menyebabkan kenaikan harga barang dan jasa, termasuk tiket angkutan umum, yang pada gilirannya dapat mengurangi daya beli masyarakat, terutama bagi kelompok berpenghasilan rendah. Hal ini berpotensi memicu perubahan pola perjalanan, di mana konsumen mungkin akan mengurangi frekuensi perjalanan atau beralih ke moda transportasi yang lebih terjangkau. Selain itu, perusahaan transportasi juga menghadapi tantangan akibat penurunan jumlah penumpang, yang berdampak pada pendapatan mereka. Untuk tetap kompetitif, perusahaan perlu menyesuaikan strategi pemasaran

dan operasional, serta mengelola biaya dengan lebih efisien. Secara keseluruhan, kenaikan PPN ini menciptakan tantangan bagi kedua belah pihak, yang memerlukan adaptasi dan strategi baru untuk menjaga keseimbangan dalam ekosistem transportasi.

Kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 11% dapat memberikan dampak yang signifikan bagi perusahaan angkutan umum, terutama dalam hal biaya operasional dan strategi harga. Dengan meningkatnya tarif PPN, perusahaan diharuskan untuk menyesuaikan harga tiket, yang dapat mengakibatkan penurunan jumlah penumpang karena daya beli masyarakat yang berkurang. Penurunan ini dapat menyebabkan berkurangnya pendapatan perusahaan, sehingga mereka perlu mencari cara untuk mengelola biaya operasional dengan lebih efisien. Selain itu, perusahaan mungkin harus mengadopsi strategi pemasaran yang lebih inovatif untuk menarik pelanggan, seperti menawarkan paket promosi atau diskon. Jika perusahaan tidak dapat beradaptasi dengan perubahan ini, mereka berisiko menghadapi kesulitan finansial yang lebih besar, yang dapat mempengaruhi keberlanjutan usaha mereka. Penelitian oleh (Agasie & Zubaedah, 2022) menunjukkan bahwa kebijakan perpajakan yang tidak tepat dapat mengganggu stabilitas sektor transportasi dan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan.

4. KESIMPULAN

Kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 11% memberikan dampak signifikan terhadap operasional PT. Sari Kencana, terutama pada penyesuaian harga tiket, daya beli konsumen, dan efisiensi operasional perusahaan. Kebijakan ini

menyebabkan peningkatan biaya yang memengaruhi strategi harga perusahaan, sehingga diperlukan penyesuaian untuk menjaga margin keuntungan tanpa mengurangi daya saing. Selain itu, perusahaan menghadapi tantangan berupa penurunan jumlah pelanggan akibat daya beli masyarakat yang melemah, yang berpotensi menurunkan pendapatan perusahaan secara keseluruhan.

Untuk mengatasi dampak tersebut, PT. Sari Kencana mengadopsi langkah-langkah strategis seperti optimalisasi biaya operasional, peningkatan kualitas layanan, dan pemanfaatan teknologi. Upaya ini meliputi efisiensi penggunaan sumber daya, pengembangan aplikasi digital untuk pemesanan tiket, serta peningkatan kenyamanan armada. Dengan pendekatan ini, perusahaan berhasil mempertahankan loyalitas pelanggan dan daya saing di tengah tantangan kebijakan fiskal. Penelitian ini menegaskan pentingnya inovasi dan adaptasi dalam memastikan keberlanjutan bisnis di sektor transportasi.

5. REFERENSI

- Agasie, D., & Zubaedah, R. (2022). Urgensi Kenaikan Tarif Pajak Pertambahan Nilai Berdasarkan Asas Kepentingan Nasional. *Perspektif Hukum*, 50–74. <https://doi.org/10.30649/ph.v22i2.131>
- Djufri. (2022). Dampak Pengenaan Ppn 11% Terhadap Pelaku Dunia Usaha Sesuai Uu No.7 Thn 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan Di Indonesia. *Journal of Social Research*, 1(5), 391–404. <https://doi.org/10.55324/josr.v1i5.106>
- Gunawan, Utami, C. K., & Sholeh, W. M. (2022). *PENGARUH PENGETAHUAN WAJIB PAJAK, KESADARAN WAJIB PAJAK, DAN SANKSI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB*

*PAJAK HOTEL DAN RESTORAN
DI KABUPATEN BANDUNG
PADA MASA PANDEMI COVID-
19. 1.*

- Kharisma, N., Furqon, I. K.,
Abdurrahman, U. K. H., &
Pekalongan, W. (2023). Analisis
Dampak Kenaikan Tarif Pajak
Pertambahan Nilai (PPN)
Terhadap Masyarakat Dan Inflasi
Di Indonesia. *Jurnal Sahmiyya*, 2,
295–303.
- Malendes, D., Sabijono, H., & Weku,
P. (2024). Pengaruh pengetahuan
perpajakan, kesadaran wajib pajak
dan sanksi pajak terhadap
kepatuhan wajib pajak dalam
membayar Pajak Bumi dan
Bangunan di Kecamatan Pulau
Batang Dua Kota Ternate. *Riset
Akuntansi Dan Portofolio
Investasi*, 2(2), 93–100.
<https://doi.org/10.58784/rapi.131>
- Rizkianti, R. R., & Fatimah, H.
(2023). Analisis Dampak
Kenaikan Tarif Pajak
Pertambahan Nilai (PPN)
terhadap Penjualan Pada PT. XYZ
Cabang Tangerang. *Jurnal
Ekonomi, Manajemen Dan
Akuntansi*, 2(4), 199–206.
[https://doi.org/10.572349/mufakat
.v2i4.810](https://doi.org/10.572349/mufakat.v2i4.810)
- Srimaryani. (2023). Stabilisasi
Ekonomi Melalui Kebijakan
Fiskal: Studi Literatur Terkait
Dampak Pajak Terhadap
Pendapatan dan Konsumsi:
Kebijakan Fiskal dan Distribusi
Pendapatan: Efektivitas Kebijakan
Fiskal. *Jurnal Pendidikan Bisnis
Dan Ekonomi*, 9(2), 91–109.
<https://doi.org/10.2961/bise.v9i2.7>